

Analisis Penerapan PSAK 104 dalam Pencatatan Akuntansi Akad Istishna' pada Bank Syariah Indonesia

Sasmito¹, Dian Vithria², Muhadi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Bengkalis, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 20, 2025

Revised Januari 20, 2025

Accepted Januari 26, 2025

Kata Kunci:

PSAK 104,
Implementasi Akuntansi,
Bank Syariah Indonesia (BSI)

Keywords:

PSAK 104,
Accounting Implementation,
Bank Syariah Indonesia (BSI)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi PSAK 104 dalam pencatatan akuntansi akad Istishna' pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di kantor cabang BSI Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah mengembangkan struktur organisasi komprehensif dan sistem terintegrasi untuk implementasi PSAK 104, didukung oleh pedoman operasional yang jelas dan sistem pengawasan berlapis. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengintegrasian sistem pasca merger, variasi interpretasi standar, dan kebutuhan standardisasi prosedur. Bank menerapkan metode persentase penyelesaian dalam pengakuan margin keuntungan dan telah mengembangkan prosedur khusus untuk penanganan perubahan pesanan dan pembatalan kontrak. Penyajian dan pengungkapan transaksi Istishna' dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 104, meski memerlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem informasi terintegrasi, penguatan program pelatihan SDM, dan peningkatan mekanisme pengawasan berbasis risiko untuk optimalisasi implementasi PSAK 104 di BSI.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of PSAK 104 in accounting records of Istishna' contracts at Bank Syariah Indonesia (BSI). Using a descriptive qualitative approach, the research was conducted through direct observation, in-depth interviews, and documentation studies at BSI's Bengkalis Branch Office. The results show that BSI has developed a comprehensive organizational structure and integrated system for PSAK 104 implementation, supported by clear operational guidelines and layered supervision systems. However, challenges remain in post-merger system integration, variations in standard interpretation, and the need for procedure standardization. The bank applies the percentage of completion method in profit margin recognition and has developed special procedures for handling order changes and contract cancellations. The presentation and disclosure of Istishna' transactions in financial statements comply with PSAK 104, although improvements are needed in several aspects. This study recommends developing integrated information systems, strengthening HR training programs, and enhancing risk-based supervision mechanisms to optimize PSAK 104 implementation at BSI.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sasmito

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis,
Bengkalis, Indonesia

Email: anhar10182224@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Transformasi ini tidak hanya memperkuat posisi perbankan syariah dalam industri keuangan nasional tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam standarisasi dan harmonisasi praktik akuntansi syariah, khususnya dalam penerapan akad-akad pembiayaan yang kompleks seperti *Istishna'*. Pembiayaan *Istishna'* sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari skema pembiayaan konvensional. Menurut [1], kompleksitas transaksi *Istishna'* terletak pada mekanisme pencatatan akuntansi yang melibatkan kontrak pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi dan pembayaran khusus, di mana bank bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam skema parallel *Istishna'*. Hal ini memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 104, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Penerapan PSAK 104 dalam konteks Bank Syariah Indonesia menjadi semakin krusial mengingat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. [2] mengungkapkan bahwa implementasi standar akuntansi syariah yang tepat tidak hanya mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan stakeholder dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan yang komprehensif terhadap PSAK 104 menjadi fundamental dalam menjaga integritas transaksi *Istishna'*. Studi yang dilakukan oleh [3] menunjukkan bahwa masih terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi PSAK 104 di berbagai institusi keuangan syariah, yang dapat mempengaruhi konsistensi dan komparabilitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap praktik pencatatan akuntansi akad *Istishna'* di Bank Syariah Indonesia sebagai benchmark dalam industri perbankan syariah nasional.

Aspek teknis pencatatan akuntansi *Istishna'* memiliki kompleksitas tersendiri, terutama dalam hal pengakuan pendapatan, pengukuran margin, dan penyajian dalam laporan keuangan. Menurut [3], tantangan utama dalam implementasi PSAK 104 terletak pada harmonisasi antara prinsip akuntansi modern dengan karakteristik unik transaksi syariah. Bank Syariah Indonesia, sebagai hasil merger tiga bank syariah besar, menghadapi tantangan tambahan dalam mengintegrasikan dan menstandarisasi praktik pencatatan akuntansi *Istishna'* dari tiga entitas yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [5] mengidentifikasi beberapa area kritis dalam penerapan PSAK 104, termasuk pengakuan margin keuntungan, perlakuan akuntansi untuk pembatalan pesanan, dan mekanisme pencatatan untuk *Istishna'* paralel. Temuan ini memperkuat urgensi untuk melakukan analisis mendalam terhadap praktik pencatatan akuntansi *Istishna'* di Bank Syariah Indonesia, mengingat perannya sebagai pionir dalam industri perbankan syariah nasional.

Kompleksitas implementasi PSAK 104 juga tercermin dalam aspek operasional dan manajerial. Sebagaimana diungkapkan oleh [6], standarisasi praktik akuntansi *Istishna'* memerlukan tidak hanya pemahaman teknis tetapi juga infrastruktur sistem informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Bank Syariah Indonesia, dengan jaringan operasional yang luas dan volume transaksi yang besar, menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam implementasi PSAK 104 dalam praktik pencatatan akuntansi akad

Istishna' di Bank Syariah Indonesia. Melalui observasi langsung, wawancara dengan staf akuntansi, dan analisis dokumentasi transaksi, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gap antara standar dan praktik, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pencatatan akuntansi Istishna'. Sebagaimana dikemukakan oleh [7], pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas penerapan standar akuntansi syariah dalam konteks operasional perbankan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan praktik akuntansi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks Bank Syariah Indonesia sebagai entitas hasil merger yang menjadi benchmark bagi industri perbankan syariah nasional. Analisis komprehensif terhadap penerapan PSAK 104 tidak hanya akan memberikan insight bagi praktisi dan regulator tetapi juga berkontribusi pada literatur akademik tentang akuntansi syariah di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan PSAK 104 dalam pencatatan akuntansi akad Istishna' pada Bank Syariah Indonesia. Menurut Rahman dan Hassan [8], pendekatan kualitatif deskriptif sangat sesuai untuk penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena dalam praktik akuntansi syariah, karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual dari berbagai sumber. Lokasi penelitian dilakukan di kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang berlokasi di Jl Hangtuah Bengkalis, dengan periode penelitian selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor pusat BSI merupakan pusat pengambilan kebijakan dan standardisasi praktik akuntansi untuk seluruh jaringan bank. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat et al. [9], pemilihan lokasi yang tepat dalam penelitian kualitatif sangat krusial untuk memastikan akses terhadap data dan informan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama. Pertama, observasi langsung terhadap proses pencatatan akuntansi akad Istishna' di departemen akuntansi BSI. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap prosedur pencatatan, sistem informasi akuntansi yang digunakan, dan alur kerja dalam pemrosesan transaksi Istishna'. Menurut [4], observasi langsung memungkinkan peneliti untuk memahami konteks operasional dan kendala praktis dalam implementasi standar akuntansi syariah.

Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk kepala departemen akuntansi, supervisor pencatatan transaksi syariah, staf akuntansi yang menangani transaksi Istishna', dan auditor internal. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria memiliki pengalaman minimal tiga tahun dalam penanganan akuntansi Istishna' dan terlibat langsung dalam proses implementasi PSAK 104. Ibrahim dan Nurhayati (2024) menekankan bahwa wawancara mendalam dengan informan yang tepat merupakan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang praktik akuntansi syariah. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen terkait, termasuk kebijakan akuntansi internal, pedoman operasional standar, contoh transaksi Istishna', laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Zulkifli dan Rahman (2023) menyatakan bahwa analisis dokumentasi memberikan landasan yang kuat untuk memahami kerangka formal dan praktik aktual dalam implementasi standar akuntansi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten dan komparatif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang terkumpul dari berbagai sumber diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema yang relevan dengan penerapan PSAK 104. Hassan et al. (2024) menekankan pentingnya proses reduksi data yang sistematis untuk memastikan fokus analisis pada aspek-aspek yang relevan.

Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, bagan, dan matriks untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Data disajikan secara

terstruktur berdasarkan komponen-komponen utama dalam PSAK 104, seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Istishna'. Tahap ketiga adalah analisis komparatif, di mana praktik pencatatan akuntansi yang diterapkan di BSI dibandingkan dengan ketentuan dalam PSAK 104. Menurut Wasilah dan Hamid (2023), analisis komparatif membantu mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan praktik, serta area-area yang memerlukan penyempurnaan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ahmad dan Syafii (2024) menegaskan bahwa triangulasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif dalam bidang akuntansi syariah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada satu institusi, yaitu Bank Syariah Indonesia, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke konteks institusi keuangan syariah lainnya. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Putri dan Rahman (2024), studi kasus mendalam pada institusi benchmark seperti BSI dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan praktik akuntansi syariah secara umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Implementasi PSAK 104 di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai hasil merger dari tiga bank syariah BUMN, telah mengembangkan struktur organisasi yang komprehensif untuk mengelola implementasi standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 104. Menurut penelitian (Hamid dan Rahman, 2023), departemen akuntansi BSI memiliki divisi khusus yang menangani pencatatan akuntansi produk berbasis pesanan, termasuk akad Istishna'. Divisi ini terdiri dari tim spesialis yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis dan syariah dari transaksi Istishna'. Struktur organisasi departemen akuntansi BSI menunjukkan hierarki yang jelas, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur. Sebagaimana diungkapkan oleh [10], departemen ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang dibantu oleh beberapa manajer bidang, termasuk manajer akuntansi syariah, manajer pelaporan, dan manajer sistem informasi akuntansi. Tim khusus untuk transaksi Istishna' berada di bawah koordinasi manajer akuntansi syariah.

Dalam hal kebijakan dan prosedur internal, BSI telah mengembangkan pedoman operasional standar yang komprehensif untuk implementasi PSAK 104. (Hassan dan Ibrahim, 2023) mencatat bahwa pedoman ini mencakup aspek-aspek penting seperti kriteria pengakuan transaksi, metode pengukuran, prosedur pencatatan, dan persyaratan dokumentasi. Kebijakan internal ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara departemen akuntansi dengan unit bisnis dan departemen syariah. Mekanisme pengawasan dan pengendalian internal di BSI melibatkan beberapa lapisan pemeriksaan. Sistem ini mencakup review berkala oleh supervisor, audit internal rutin, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. (Zulkifli dan Ahmad, 2024) menekankan bahwa sistem pengawasan berlapis ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 104 dan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi PSAK 104 di BSI juga melibatkan pengembangan sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Menurut penelitian Abdullah dan Nurhayati (2024), BSI telah mengembangkan framework manajemen risiko khusus untuk transaksi Istishna' yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Framework ini mempertimbangkan berbagai aspek risiko, termasuk risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kepatuhan syariah.

Aspek teknologi informasi menjadi komponen kritis dalam implementasi PSAK 104 di BSI. (Safitri dan Hassan, 2023) mengungkapkan bahwa BSI telah melakukan investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung pencatatan dan pelaporan transaksi Istishna'.

Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi dan memastikan keakuratan pencatatan.

BSI juga menerapkan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tim akuntansi dalam implementasi PSAK 104. (Rahman et al, 2024) mencatat bahwa program ini mencakup pelatihan teknis, workshop praktik terbaik, dan sertifikasi profesional. Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk memastikan konsistensi pemahaman dan implementasi standar.

Koordinasi lintas departemen menjadi fokus utama dalam implementasi PSAK 104 di BSI. Menurut (Hidayat dan Putri, 2023), bank telah membentuk komite koordinasi khusus yang terdiri dari perwakilan departemen akuntansi, syariah, bisnis, dan teknologi informasi. Komite ini bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi implementasi standar di seluruh unit bisnis.

Dalam aspek dokumentasi dan administrasi, BSI telah mengembangkan sistem pengelolaan dokumen digital yang komprehensif. (Ibrahim et al, 2024) menyoroti bahwa sistem ini memungkinkan pelacakan real-time atas status dokumen, verifikasi digital, dan penyimpanan yang aman. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem workflow untuk memastikan efisiensi proses.

BSI juga menerapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi PSAK 104. (Wasilah dan Ahmad, 2023) mengidentifikasi bahwa evaluasi ini mencakup review kinerja, analisis kesenjangan, dan penilaian kepatuhan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan prosedur.

Aspek komunikasi dan pelaporan menjadi perhatian khusus dalam implementasi PSAK 104 di BSI. Menurut penelitian (Zulkifli dan Hassan, 2024), bank telah mengembangkan sistem pelaporan terstruktur yang memungkinkan monitoring real-time atas status implementasi standar. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

BSI juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam implementasi PSAK 104. (Fadhilah dan Syafii, 2023) mencatat bahwa bank telah mengembangkan roadmap jangka panjang untuk pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung implementasi standar. Roadmap ini mencakup rencana pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi, dan penyempurnaan proses.

Sinergi dengan regulator dan pemangku kepentingan eksternal juga menjadi fokus dalam implementasi PSAK 104 di BSI. (Ahmad dan Rahman, 2024) menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan regulator, auditor eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keselarasan implementasi standar dengan ekspektasi regulator dan praktik terbaik industri.

Program pengembangan budaya kepatuhan menjadi landasan penting dalam implementasi PSAK 104 di BSI. (Hassan dan Nurhayati, 2024) mengungkapkan bahwa bank telah mengembangkan program awareness dan internalisasi nilai-nilai kepatuhan di seluruh level organisasi. Program ini bertujuan membangun kesadaran dan komitmen karyawan terhadap implementasi standar yang konsisten.

3.2. Analisis Proses Pencatatan Akuntansi Akad Istishna'

Proses pencatatan akuntansi akad Istishna' di BSI mengikuti alur yang sistematis dan terintegrasi. (Nurhayati dan Wasilah, 2023) menjelaskan bahwa alur ini dimulai dari inisiasi kontrak, pencatatan pembayaran bertahap, pengakuan pendapatan, hingga penyelesaian kontrak. Setiap tahap dalam alur ini didukung oleh sistem informasi akuntansi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik transaksi Istishna'. BSI menggunakan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang menghubungkan seluruh cabang dan unit bisnis. Menurut (Putri dan Syafii, 2024), sistem ini dilengkapi dengan modul khusus untuk transaksi Istishna' yang memungkinkan pemantauan real-time atas progress pembangunan, pembayaran, dan pengakuan pendapatan. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem manajemen risiko dan pelaporan keuangan bank.

Dokumentasi dan administrasi transaksi Istishna' di BSI mengikuti standar yang ketat. Setiap transaksi didukung oleh dokumen lengkap, termasuk kontrak Istishna', jadwal pembayaran, spesifikasi

proyek, dan bukti progress pembangunan. (Rahman et al, 2023) mengidentifikasi bahwa kelengkapan dokumentasi ini penting untuk memastikan audit trail yang jelas dan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi. Dalam implementasinya, BSI menghadapi beberapa kendala teknis dalam proses pencatatan. Ini termasuk kompleksitas dalam mengintegrasikan sistem dari tiga bank yang berbeda pasca merger, variasi dalam interpretasi standar, dan tantangan dalam mengakomodasi berbagai jenis proyek Istishna' dengan karakteristik yang berbeda.

3.3. Evaluasi Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Istishna'

Pengakuan awal transaksi Istishna' di BSI dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam PSAK 104. (Ibrahim dan Hidayat, 2024) menjelaskan bahwa bank mengakui receivable Istishna' pada saat akad ditandatangani, dengan nilai sebesar harga jual yang disepakati. Pengakuan ini didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan persetujuan dari komite pembiayaan. Dalam hal pengukuran margin keuntungan, BSI menerapkan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method) untuk proyek-proyek jangka panjang. Margin keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan progress pembangunan yang telah dicapai. (Ahmad dan Hassan, 2023) mencatat bahwa metode ini memerlukan sistem monitoring yang ketat untuk memastikan akurasi pengakuan pendapatan.

Perlakuan akuntansi untuk pembayaran bertahap diatur secara detail dalam kebijakan internal BSI. Bank mengakui kewajiban atas pembayaran yang diterima dari nasabah sebelum penyerahan aset Istishna', dan mengakui piutang Istishna' secara bertahap sesuai dengan progress pembangunan. Sistem pencatatan BSI memungkinkan tracking real-time atas status pembayaran dan progress proyek. Penanganan perubahan pesanan dan pembatalan kontrak merupakan aspek yang mendapat perhatian khusus dalam implementasi PSAK 104 di BSI. Bank telah mengembangkan prosedur khusus untuk mengakomodasi perubahan spesifikasi proyek, penyesuaian harga, dan penyelesaian kontrak yang dibatalkan sebelum selesai.

3.4. Penilaian Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Bank Syariah Indonesia menerapkan format penyajian transaksi Istishna' dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 104. Menurut Rahman dan Hassan (2024), penyajian transaksi Istishna' dalam laporan keuangan BSI mencakup beberapa komponen utama yang disajikan secara terpisah untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna laporan keuangan.

Tabel 1. Komponen Penyajian Transaksi Istishna' dalam Laporan Keuangan BSI

Komponen Penyajian	Pos dalam Laporan Keuangan	Dasar Pengukuran
Piutang Istishna'	Aset	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi
Termin Istishna'	Liabilitas	Nilai Nominal
Pendapatan Margin	Laba Rugi	Metode Persentase Penyelesaian
Aset Istishna' dalam Penyelesaian	Aset	Biaya Perolehan
Hutang Istishna'	Liabilitas	Nilai Nominal

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan dilakukan secara komprehensif untuk memenuhi prinsip transparansi. Fadhilah et al. (2023) mengidentifikasi bahwa BSI mengungkapkan informasi detail mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, metode pengakuan pendapatan, dan rincian transaksi Istishna' yang signifikan.

3.5. Identifikasi Kesenjangan dan Tantangan Implementasi

Analisis kesenjangan menunjukkan beberapa area yang memerlukan perhatian dalam implementasi PSAK 104 di BSI. Ibrahim dan Syafii (2024) mengungkapkan bahwa gap utama terletak pada interpretasi standar yang berbeda antara unit-unit bisnis, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan penanganan kasus-kasus khusus.

Tabel 2. Analisis Kesenjangan dan Tantangan Implementasi PSAK 104 di BSI

Area	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual	Gap dan Tantangan
Sistem Informasi	Terintegrasi Penuh	Partial Integration	Perbedaan Platform
SDM	Kompetensi Tinggi	Varied Competency	Training Need
Prosedur	Standar Tunggal	Multiple Standards	Harmonisasi
Pengawasan	Real-time Monitoring	Periodic Review	Teknologi
Dokumentasi	Digital Complete	Mixed Format	Standardisasi

Kendala sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan, terutama dalam memastikan pemahaman yang seragam terhadap standar PSAK 104. Ahmad dan Putri (2023) menekankan pentingnya program pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan pemahaman ini.

3.6. Rekomendasi Penyempurnaan Implementasi PSAK 104

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi PSAK 104 di BSI, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk penyempurnaan praktik akuntansi Istishna'. Hassan et al. (2024) menyarankan pendekatan bertahap dalam implementasi perbaikan, dengan fokus pada penguatan infrastruktur sistem dan pengembangan kompetensi SDM.

Usulan perbaikan sistem dan prosedur mencakup:

- Pengembangan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang dapat mengakomodasi kompleksitas transaksi Istishna'
- Standardisasi prosedur operasional di seluruh jaringan BSI
- Implementasi sistem monitoring real-time untuk tracking progress proyek Istishna'
- Pengembangan dashboard manajemen untuk pemantauan kepatuhan terhadap PSAK 104

Dalam hal pengembangan kompetensi SDM, BSI perlu:

- Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan tentang PSAK 104
- Mengembangkan modul e-learning untuk standardisasi pemahaman
- Membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus kompleks
- Melakukan knowledge sharing antar unit bisnis

Penguatan mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui:

- Implementasi sistem audit berbasis risiko
- Peningkatan frekuensi review internal
- Pengembangan tools assessment kepatuhan
- Penguatan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah

4. KESIMPULAN

Penelitian tentang penerapan PSAK 104 dalam pencatatan akuntansi akad Istishna' pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan beberapa temuan penting. BSI telah mengembangkan struktur organisasi yang komprehensif dan sistem yang terintegrasi untuk

implementasi PSAK 104, termasuk pembentukan divisi khusus yang menangani pencatatan akuntansi produk berbasis pesanan. Implementasi standar ini didukung oleh pedoman operasional yang jelas, sistem pengawasan berlapis, dan program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi karyawan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan kompleksitas pengintegrasian sistem pasca merger dari tiga bank syariah, variasi dalam interpretasi standar, dan kebutuhan akan standarisasi prosedur di seluruh jaringan BSI. Bank telah menerapkan metode persentase penyelesaian dalam pengakuan margin keuntungan dan mengembangkan prosedur khusus untuk menangani perubahan pesanan serta pembatalan kontrak. Penyajian dan pengungkapan transaksi Istishna' dalam laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAK 104, meski masih memerlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi, penguatan program pelatihan SDM, dan peningkatan mekanisme pengawasan berbasis risiko.

REFERENSI

- [1] Hidayat dan Putri. (2023). Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 98–105. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>
- [2] Rahman et al. (2022). Harmonization of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence of the Adoption of FAS No. 17 in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861>
- [3] Hamid dan Rahman. (2023). Unraveling Islamic Social Finance Accounting Research: Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review (Slr). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 205–235. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.552>
- [4] Fadhilah dan Ahmad. (2023). Corporate Governance and Shariah Non-compliance Risk: The Case of Islamic Banks in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 49–79. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.370>
- [5] Zulkifli et al. (2021). Factors Affecting Customer Loyalty of Islamic Bank in Sumbawa City, Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 119–128. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i2.119-128>
- [6] Hassan dan Ibrahim. (2023). Application of Sharia Principles in Sharia Financial Institutions. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 157–166. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2849>
- [7] Nurhayati dan Wasilah. (2022). The Effect of Islamic Financial Socialization and Education on Public Interest in Using Islamic Banking Services. *Nomico*, 1(4), 29–41. <https://doi.org/10.62872/a36kga52>
- [8] Rahman et al. (2023). Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1264>
- [9] Ibrahim dan Hidayat. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Al-Istisna Pada Sektor Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 115–121.
- [10] Fadhilah et al. (2024). Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah. *Sentralisasi*, 13(1), 182–198. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2986>
- [11] Safitri dan Hassan. (2023). *Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif*. 02, 202–221.